

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Strategi

1. Definisi Manajemen Strategi

Ada beberapa definisi mengenai manajemen strategi yang dikemukakan oleh para ahli dalam buku yang mereka tulis. Salah satunya pendapat Wheelen dan Hunger (2008): “Manajemen Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian.”

Manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) lingkungan eksternal perusahaan dengan melihat kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dalam lingkungan internal perusahaan. Sementara itu, proses manajemen strategi meliputi 4 (empat) elemen dasar yaitu: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Pada level korporasi, proses manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan sampai dengan evaluasi.

2. Definisi Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* (*Stratos* = militer dan *ag* = memimpin) yang berarti *general ship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi didefinisikan sebagai suatu cara pencapaian tujuan. Strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri Dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹³

John A. Byrne mendefinisikan strategi sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumberdaya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan. Sementara itu, Jack Trout dalam bukunya *Trout On*

¹³ Husein Umar, *Strategic Management in Action*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 31

Strategy, inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik di benak konsumen, menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata yang sederhana di kepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama daripada menjadi yang lebih baik.¹⁴

3. Tingkatan strategi

Dalam manajemen strategi, pada umumnya perusahaan atau badan usaha memiliki tiga level atau tingkatan strategi, diantaranya yaitu:

a. Strategi tingkat korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Strategi ini dirumuskan dan ditetapkan oleh kelompok orang yang menduduki jabatan manajemen puncak yang mencakup semua kegiatan organisasi, termasuk beraneka bidang bersifat bisnis yang ditangani dan semua kegiatan yang bersifat fungsional. Bahkan termasuk strategi interaksi dengan lingkungan eksternal. Intinya terletak pada definisi yang mengatakan bahwa strategi merupakan keputusan mendasar tentang dalam bidang apa

¹⁴ M. Suyanto, *Marketing Strategy*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, Penerbit Andi, 2007), hal. 16

organisasi bergerak sekarang dan di masa yang akan datang. Berdasarkan jangka waktu, strategi korporasi memiliki kurun waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan strategi yang lain.¹⁵

b. Strategi tingkat bidang satuan bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini pada umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan. Strategi bisnis diimplementasikan biasanya merupakan salah satu strategi *overall cost leadership* atau diferensiasi.

c. Strategi tingkat fungsional

Strategi fungsional memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan tingkatan yang lain. Strategi ini berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi Sumber Daya Manusia (SDM), fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan (R&D). Strategi fungsional ini harus terus mengarah kepada strategi bisnis, sementara untuk konsep mereka yang paling utama adalah sesuai dengan metode dan cara penerapannya.

¹⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hal. 21

4. Perumusan strategi

Perumusan strategi sangat diperlukan setelah mengetahui sesuatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki serta kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan.

a. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik, mengidentifikasikan tujuan mendasar yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani.¹⁶

b. Tujuan Organisasi

Tujuan adalah pernyataan luas tentang apa yang akan dituju dan diwujudkan oleh organisasi, seperti misalnya memproduksi produk unggul, menjadi *market leader*, mengelola usaha secara efektif, dan memiliki teknologi unggul. Tujuan merupakan penjabaran misi organisasi.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 31

c. Strategi Organisasi

Pada dasarnya, setiap perusahaan mempunyai suatu strategi dalam berusaha. Bentuk strategi akan berbeda-beda antar industri, antar perusahaan dan bahkan antar situasi yang berbeda. Namun, ada sejumlah strategi yang sudah banyak diketahui, di mana alternatif strategi-strategi tersebut relatif dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran perusahaan. Strategi-strategi ini dikelompokkan sebagai strategi generik. Dari bermacam-macam strategi dalam kelompok strategi generik ini, pada tahapan berikutnya akan dipilih salah satu strategi atau kombinasi dari beberapa strategi untuk dijadikan sebagai *grand strategy* untuk diimplementasikan.

d. Lingkungan

Untuk merealisasikan misinya, perusahaan akan banyak menemui kesulitan, jika ia tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternal menjadi sangat penting, apalagi kondisi lingkungan eksternal itu berada diluar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Selain kondisi lingkungan eksternal, pemahaman terhadap kondisi lingkungan internal perusahaan secara luas dan mendalam juga perlu dilakukan, oleh karena itu, strategi yang dibuat perlu konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dari lingkungan internal ini, mampu memahami terkait kelemahan-kelemahan dan kekuatan.

Selain mengetahui kekuatan dan kelemahan tadi, perusahaan perlu mengetahui peluang-peluang yang selayaknya untuk dimanfaatkan dari lingkungan eksternalnya agar perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif, sekaligus mengetahui ancaman-ancamannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebelum manajer melakukan strategi apa yang cocok bagi jalannya perusahaan di masa datang, mereka harus menganalisis terlebih dahulu kondisi internal dan eksternalnya.

e. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya, yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsional yang diikutinya.¹⁷

5. Jenis-jenis alternatif strategi

Menurut David (2004), ada beberapa jenis strategi alternatif. Berikut ini adalah jenis-jenis strategi alternatif yang dibagi kedalam 4 kelompok, yaitu:

¹⁷Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis. Dan Praktik Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 20

a. Strategi Integrasi

Strategi integrasi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan atau pesaing. Jenis-jenis strategi integritas adalah sebagai berikut:

- 1) Integritas ke depan adalah jenis integrasi yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau paritel.
- 2) Integrasi ke belakang adalah jenis integrasi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan.
- 3) Integrasi horizontal adalah jenis integrasi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing.

b. Strategi Intensif

Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. Strategi intensifikasi dibagi mejadi tiga, yaitu:

- 1) Penetrasi pasar adalah jenis strategi yang mengusahakan perluasan *market share* melalui usaha pemasaran atau promosi.
- 2) Pengembangan pasar adalah jenis strategi yang mengusahakan perluasan pangsa pasar ke wilayah geografis baru.

3) Pengembangan produk adalah adalah jenis strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk/jasa pengembangan produk/jasa baru.

c. Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi adalah suatu jenis strategi di mana perusahaan menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan. Strategi diversifikasi dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Diversifikasi terkait adalah jenis strategi di mana perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan yang lama.
- 2) Diversifikasi tak terkait adalah jenis strategi di mana perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan sama sekali dengan garis bisnis perusahaan sebelumnya.

d. Strategi Defensif

Strategi defensif adalah strategi di mana kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Strategi defensif dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Penciutan adalah strategi di mana dilakukan pengelompokan ulang (*regrouping*) melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun.
- 2) Divestasi adalah strategi di mana dilakukan penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi.
- 3) Likuidasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan seluruh asset perusahaan. Secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya.

6. Definisi pengembangan

Definisi pengembangan banyak disampaikan oleh para ahli diantaranya menurut Flippo, pengembangan adalah suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan & ketrampilan SDM guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan (peningkatan kemampuan), dan peningkatan ketrampilan (melalui pelatihan). Pengembangan menurut Malayu SP Hasibuan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengertian pengembangan (*development*) menurut Mathis adalah segala upaya untuk meningkatkan kinerja manajemen saat ini atau masa depan dengan memberi bekal pengetahuan, perubahan sikap, atau peningkatan ketrampilan. Pengembangan merupakan usaha yang dilakukan oleh individu untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau

yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pengembangan yang cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan (*unplanned change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*). Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana).¹⁸

7. Konsep Pengembangan Masyarakat

Twelvetrees dalam bukunya Zubaedi mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat adalah “*The process of assisting ordinary people the improve their own communities by undertaking collective action*”.¹⁹ Sedangkan menurut United Nation, Pengembangan masyarakat adalah “suatu proses yang didesain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan

¹⁸ Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 120-121.

¹⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 05.

partisipasi aktif dan untuk memenuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas”. Secara umum, pengembangan masyarakat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperluas, atau meningkatkan, atau mengubah potensi-potensi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatu keadaan sebelumnya.²⁰ Bisa diartikan bahwa pengembangan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Pengembangan masyarakat mencakup aspek kuantitas dan kualitas dengan dimensi yang cukup luas dan tatarannya yang bervariasi dari kognitif sampai kepada afektif.

Jim Ife dalam bukunya menganggap bahwa pada saat pelaksanaan pengembangan masyarakat, semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang diwujudkan. Partisipasi sangat penting untuk perubahan dari bawah dan sangat penting dalam mempertahankan fokus pada proses.²¹

Pengembangan masyarakat memang menekankan pada proses, bukan hasil. Dimana dalam konsep pengembangan masyarakat berbeda dengan pembangunan yang didominasi oleh persoalan hasil dan tujuan.

²⁰ Ayub M. *Padangan, Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari : Unhalu Press, 2011), hal. 29

²¹ JIM Ife Frank Tesoriere, *Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 335.

Namun untuk saat ini pengembangan masyarakat merupakan konsep dari pembangunan berbasis masyarakat, dimana dalam implementasinya partisipasi adalah prinsip fundamental dalam pengembangan masyarakat.

Indikator keberhasilan dalam pengembangan masyarakat adalah adanya kerja kolektif dari *stakeholder* pengembangan masyarakat itu sendiri. Yang menjadi *stakeholder* pengembangan masyarakat adalah:

- a. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana, penglokasian dana, menjadi penghubung dengan pihak swasta.
- b. Organisasi sebagai salah satu indikator dalam mendukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
- c. Masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari upaya yang direncanakan pemerintah.

B. Perekonomian Masyarakat

1. Definisi Ekonomi

Di dalam struktur sosial kemasyarakatan banyak terdapat ukuran-ukuran di dalam pelapisan-pelapisan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut yang lebih dikenal dengan istilah stratifikasi sosial diantaranya adalah pelapisan yang terjadi karena kekayaan seseorang yang lebih dikenal dengan sebutan tingkat ekonomi. Sebelum beranjak lebih jauh untuk memahami hal tersebut perlu untuk menelaah kembali pengertian

dari ekonomi itu sendiri sebagai arti dasar pembentukan tingkatan atau pelapisan yang terjadi di dalam struktur sosial kemasyarakatan tersebut. Ekonomi sendiri adalah sebuah cabang ilmu sosial yang berobjek pada individu dan masyarakat, secara etimologis dapat diartikan ekonomi terdiri dari dua suku kata bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos yang berarti tata laksana rumah tangga.²² Dapat dilihat dari namanya maka pada saat pertama kali diperkenalkan ekonomi sendiri mempunyai ruang lingkup kajian dan permasalahan yang sangat terbatas yaitu hanya pada tata laksana rumah tangga dan hanya pada permasalahan mencukupi kebutuhan rumah tangga saja.

Untuk melihat defenisi ekonomi secara utuh berdasarkan buku karya Rosyidi, diambil definisi bahwa : “ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karna perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai kemakmuran”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa ekonomi secara umum mengkaji mengenai pemenuhan kebutuhan manusia dan kemakmuran manusia, dua hal pokok dari permasalahan ekonomi tersebut yaitu kebutuhan dan pencapaian kemakmuran merupakan salah satu dasar di

²² Sueherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Erlangga, 2009) hal. 5.

dalam pelapisan sosial di dalam masyarakat bila dihubungkan dengan permasalahan mikro tingkat ekonomi masyarakat, dengan kata lain semakin makmur seseorang dan semakin mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai tingkatannya maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi seseorang di dalam struktur sosial kemasyarakatan.

Dalam ekonomi terdapat satu unsur yaitu kekayaan yang menjadi ukuran di dalam studi tentang ekonomi tersebut dimana unsur kekayaan dan sumber-sumbernya merupakan kunci sukses di dalam pemenuhan tingkatan kebutuhan manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa manusia selain mempunyai kebutuhan (*needs*) juga mempunyai keinginan (*wants*), yang mana peneliti membedakannya sebagai berikut bahwa konsep kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi di dalam kehidupan manusia yang bersifat lahiriah seperti makan, minum, sandang pangan, namun berbeda dengan konsep keinginan yaitu sesuatu yang tidak harus dipenuhi namun menjadi harapan untuk dimiliki dalam kehidupan seseorang.

Dari semua uraian tentang ekonomi di atas dapat dilihat bahwa ekonomi adalah studi tentang individu dan masyarakat yang mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat yang terdiri dari berbagai hierarkis kebutuhan dan keinginan masyarakat, dimana dari konsep di atas menghasikan beberapa unsur untuk mendukung konsep tersebut namun kesemuanya itu apabila ditelaah tetap mengacu kepada

satu konsep yaitu kemampuan akses terhadap pemenuhan terhadap pemenuhan tingkatan-tingkatan kebutuhan dan keinginan manusia yang bermuara kepada kemakmuran seseorang, kemampuan akses tersebut diwujudkan melalui pendapatan seseorang dan kekayaannya yang bertujuan untuk pemenuhan berbagai tingkatan kebutuhan dan keinginannya tersebut. Aspek- aspek yang mendukung kearah pemenuhan kebutuhan tersebut teergolong dalam unsur indikator penentuan tingkatan ekonomi seseorang di dalam masyarakat.²³

2. Masyarakat Desa

Masyarakat (community) adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat tertentu, yang terkait dalam suatu norma, nilai dan kebiasaan yang disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup dimana sebagian besar individu interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komunitas manusia yang tinggal bersamasama dalam suatu wilayah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintahan nasional berada di daerah kabupaten. Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 adalah kesatuan

²³ *Ibid.*, hal.10

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, masyarakat desa adalah masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan masih menerapkan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat dan masih kental dengan budaya yang turun temurun dari nenek moyang. Berdasarkan pada tipologinya, masyarakat desa adalah masyarakat yang mendiami suatu desa.²⁴

3. Pengertian Ekonomi Masyarakat Desa

Secara bahasa, ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu negara. Sedangkan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.²⁵ Ekonomi kerakyatan menurut Sarbini bukanlah suatu ideologi gagasan baru, tetapi sekedar percobaan rumusan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur.

²⁴ Cirad, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LDMH)*, (Yogyakarta: harapan Prima, 2008), hal. 13.

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ekonomi Kerakyatan*, (online), melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi%20kerakyatan> diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

Sedangkan, ekonomi kerakyatan bagi Emil –Salim, yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila, adalah pembangunan ekonomi yang meletakkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi yang terdiri dari berbagai sub-sistem masyarakat yaitu, petani, nelayan, buruh, masyarakat penawar jasa, dan sebagainya. Masyarakat berbagai sub-sistem tersebut. sebagian terbesar berada di perdesaan yang tidak tergolong sebagai kaum menengah.²⁶

Ekonomi kerakyatan Desa (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat khususnya pada wilayah desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.²⁷

Karakteristik kegiatan perekonomian pada suatu kawasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga sektor pertumbuhan, yaitu:

- a. Sektor pertumbuhan primer, yakni sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian

²⁶ Syafaruddin Alwi, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, JEP Vol. 2 No. 2, 1997, hal. 168.

²⁷ Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), hal. 111.

- b. Sektor pertumbuhan suplementer, yakni sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer
- c. Sektor pertumbuhan terkait, yakni sektor atau ekonomi yang berkembang seirama dengan kenaikan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri.²⁸

Menurut Prof. Mubyarto, ciri-ciri ekonomi Kerakyatan adalah:

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral
- b. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan pemerataan sosial yang disebut “egaliterism” yang sesuai dengan asas kemanusiaan
- c. Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan system perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang menjiwai ekonomi
- d. Koperasi menjadi soko guru bagi rakyat
- e. Adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam menunjang kesejahteraan sosial.²⁹

Sedangkan menurut Prof. Sri Edi Swasono, ciri ekonomi kerakyatan adalah:

²⁸ Hernowo Basah, *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*, (Jakarta: BAPPENAS, 2004), hal. 124.

²⁹ Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan...*, hal. 47.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya ada etika moral yang berdasar Ketuhanan, bukan berdasarkan materialism.
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya ekonomi yang modern atau ekonomi yang non-Neo-klasikal tidak mengenal kekerasan, penghisaban, ataupun riba
 - c. Persatuan berdasar sosio-nasionalisme yang artinya ekonomi beraskan kekeluargaan, gotong royong, dan tidak saling mematikan
 - d. Kerakyatan berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, dan
 - e. Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya kemakmuran rakyat yang utama.
4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa macam, strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain :

- a. *Direct Contact* (bertatap muka langsung dengan sasaran)

Metode ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat baik

kalu mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.

- b. Demonstrasi Hasil, yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara uyang lama yang mereka kuasai.
- c. Demonstrasi Proses, adalah memperlihatkan kepada orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari mereka menggunakan sesuatu alat baru.
- d. Paksaan Sosial adalah suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki.³⁰

Selain strategi diatas, ada strategi pendekatan konservatif yang berupaya mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dalam parameter konvensional. Adapun yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi konservatif adalah melalui :

Pertama, menarik industri. Pendekatan ini berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam ekonomi mainstream dengan cara menghimpun inisiatif.

³⁰ Supriyati Istiqamah, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandar Lampung : Fakultas Dakwah, 2008), hal. 45.

Pendekatan ini mencoba menarik industry baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan bagus untuk berinvestasi

Kedua, memulai industri lokal. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian serta penafsiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu dan kemudian memutuskan apa jenis industry baru yang akan berhasil.

Ketiga, pariwisata. Mempromosikan pariwisata menjadi alternatif yang menarik, pariwisata akan menjadi sumber daya yang potensial yang dapat mendatangkan penghasilan, dan juga sebagai industri bersih yang tidak menimbulkan polusi serta dapat mendukung terbukanya tenaga kerja.³¹

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah desa lainnya.

Willy Wirasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu:

³¹ Jim Ife Frank Tesoriere, *Community Development...*, hal. 424-426.

- a. mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan.
 - b. memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian.
 - c. memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya.
 - d. menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan datang.³²
5. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :³³

- a. Pelatihan usaha, melalui pelatihan masyarakat diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam seluk beluk yang ada didalamnya dengan tujuan meningkatkan produktifitasb, perbaikan mutu dan nilai tambah produk serta perbaikan manajemen

³² Ickuk Ranga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), hal. 10.

³³ Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 225.

untuk meningkatkan efisiensi usaha dengan pengembangan jejaringan kemitraan.

- b. Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empiric.
- c. Penyusunan proposal, sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal dapat memungkinkan terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian
- d. Permodalan, yang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
- e. Jaringan bisnis, sebagai upaya konsistensi, keberlanjutan usaha yang akan dilaksanakan.

C. Badan Usaha Milik Desa

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset,

jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³⁴

Konsepsi *Tradisi Berdesa* merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUMDesa. *Tradisi Berdesa* paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDesa. Inti gagasan dari *Tradisi Berdesa* dalam pendirian BUMDesa adalah:

- a. BUMDesa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
- b. BUMDesa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh BUMDesa.
- c. BUMDesa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDesa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- d. BUMDesa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi

³⁴ Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 11.

dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa.

- e. BUMDesa menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- f. BUMDesa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik desa”

2. Landasan Hukum (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat berdiri berdasarkan landasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” hal ini digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.³⁵

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Badan Usaha Milik Desa juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab X sebanyak empat pasal (Pasal 87-90). Ketentuan yang diatur dalam bab ini dapat diringkas menjadi dua, yaitu:

- a. Pendirian BUMDesa.
- b. Pengembangan dan pemanfaatan hasil BUMDesa.

Dalam UU Desa selain ada ketentuan jaminan desa dapat mendirikan BUMDesa juga ada ketentuan terkait jenis layanan BUMDesa seperti yang termaksud dalam Pasal 87 ayat 3 jelas disebutkan, ruang usaha yang bisa dilakukan BUMDesa adalah menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Artinya, BUMDesa dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.³⁶

3. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Tujuan pembentukan BUMDesa yaitu:

- a. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.

³⁶ Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015), hal. 401-402.

- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- e. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- f. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.³⁷

4. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berikut langkah-langkah pelebagaan BUMDesa secara partisipatif yang bertujuan agar agenda pendirian BUMDesa benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa:

- a. Sosialisasi tentang BUMDesa, inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten maupun pendamping pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).
- b. Pelaksanaan musyawarah desa, secara praktikal musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa.

³⁷ Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa...*, hal. 410.

Salah satu tahapan dalam musyawarah desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDesa oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para pendamping untuk melakukan kajian kelayakan usaha pada tingkat sederhana yakni:

- 1) Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- 2) Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa dan masyarakat luar desa.
- 3) Merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT atau LKM) maupun tidak berbadan hukum.
- 4) Klasifikasi jenis usaha pada lokasi desa yang baru memulai usaha ekonomi desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDesa dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*).
- 5) Organisasi pengelola BUMDesa termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus).
- 6) Modal usaha BUMDesa. Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa. Modal BUMDesa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.

- 7) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
 - 8) Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDesa.
- c. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDesa (lampiran: AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes).³⁸
5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDesa
- BUMDesa sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip berikut:
- a. Koorperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
 - b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.
 - c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

³⁸ Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa...*, hal. 28-35.

- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.³⁹

6. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

BUMDesa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “Usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:⁴⁰

a. *Serving*

BUMDesa menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDesa ini memberikan *social benefits* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh: usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.

b. *Banking*

³⁹ Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa...*, hal. 409.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 411.

BUMDesa menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

c. Renting

BUMDesa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. Brokering

BUMDesa menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDesa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

e. Trading

BUMDesa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dll.

f. Holding

BUMDesa sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDesa agar tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, “Desa Wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.⁴¹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”, oleh Miranda Dwi Fauzi, 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan peran dari daripada Bumdes. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Bumdes mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Selain memberikan pelayanan kepada

⁴¹ Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa...*, hal. 32.

masyarakat, bumdes juga menjadi wadah untuk melakukan kegiatan produktif bagi ibu-ibu ataupun masyarakat yang lain, dan memiliki peran sebagai sarana edukasi bagi generasi millennial. Persamaanya pada penelitian ini sama-sama menggunakan subjek Bumdes sebagai tempat penelitian sekaligus menjadi perantara memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada pengembangan usaha, sedangkan dalam penelitian ini sebagai media untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.⁴²

Penelitian yang berjudul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, oleh M. Atshil M.A, 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDesa yang ada di wilayahnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya BUMDesa mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang didirikan di BUMDesa tersebut mampu memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan subjek BUMDesa sebagai tempat penelitian sekaligus menjadi

⁴² Miranda Dwi Fauzi, *Peran Badan usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar*”, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), hal. 112.

perantara memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat.. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan penilaian partisipasi masyarakat untuk melihat perkembangan BUMDesa, sementara dalam penelitian ini langsung kepada BUMDesanya saja.⁴³

Penelitian yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Prespektif Ekonomi Islam”, Irkham Abdur Rochim, 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pengelolaan BUMdesa di desa tersebut dan mengetahui peran Bumdesa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Bumdesa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah terealisasi dengan adanya beberapa unit usaha yang sudah berdiri, seperti unit serba usaha, unit simpan pinjam, unit pengelolaan sampah dan unit pariwisata. Selain itu, bumdesa juga memiliki peran dalam pebangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial .Persamaannya adalah sama-sama menggunakan subjek Bumdesa dalam melakukan penelitian sekaligus menjadi perantara memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan prespektif ekonomi islam

⁴³ M. Atshil M. A “*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*”, (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 108-109

dalam dasar hukumnya, sementara dalam penelitian ini berdasarkan hukum sosial yang berlaku di masyarakat.⁴⁴

Penelitian yang berjudul “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”, oleh Herlina, 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sumbangan Bumdes dalam meringankan kehidupan masyarakat dan tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi Bumdes dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Bumdes telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat melalui dana pinjaman, membrikan seminar, pelatihan dan konsultasi dalam mengelola keuangan. Dengan kontribusi bumdes tersebut telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dibandingkan sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan bumdes. Persamaannya sama-sama menggunakan Bumdesa sebagai tempat penelitian sekaligus menjadi perantara memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

⁴⁴ Irkham Abdur Rochim, “*Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*” (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), hal 79-80

Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan landasan ekonomi islam sementara penelitian ini pada hukum pemerintahan yang berlaku.⁴⁵

Penelitian yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai”, oleh Halimatus Sakdiah, 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui program bumdesa dan pencapaiannya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat serta hambatan-hambatannya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dilihat dari beberapa indikator pemberdayaan masyarakat di desa liberia dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat dan tingkat pengelolaan bumdesa desa ini sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sudah dapat keadilan dan kepedulian dari pemerintah desa dan telah berhasil memanfaatkan modal dari Bumdesa. Hambatan yang didapatkan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya modal dari bumdesa yang membuat masyarakat hanya bergiliran menerima modal. Persamaannya adalah sama-sama menjelaskan peran Bumdesa sebagai tempat penelitian sekaligus menjadi perantara memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaannya penelitian terdahulu melihat program-program Bumdesa, sedangkan dalam penelitian ini melihat dari beberapa produk yang

⁴⁵ Herlina, “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*”.)” (Riau: Skripsi tidak diterbitkan, 2012), hal. 64

dihasilkan dalam Bumdesa yang berpengaruh langsung terhadap perekonomian masyarakat.⁴⁶

Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”, Oleh Fitria, Vol 1 No. 1, 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bumdes beserta implikasinya. Hasil dari penelitian adalah proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bumdes yaitu memberikan modal kepada masyarakat, pemasaran, kemitraan serta penguatan kelembagaan . Persamaannya adalah sama-sama menjelaskan peran Bumdesa sebagai tempat penelitian sekaligus menjadi perantara memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaannya penelitian terdahulu melihat dari tata kelola perkembangan program-program pada Bumdes, sedangkan dalam penelitian ini melihat dari perkembangan produk yang dihasilkan unit usaha Bumdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.⁴⁷

Penelitian yang berjudul “Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia”, oleh Zulifah Chikmawati, Vol.5 No.1, 2019. Metode penelitian yang

⁴⁶ Halimatus Sakdiah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai”, (Medan: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 55.

⁴⁷ Ftria, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” STIE: Adl Islamic Economic Vol.1 No.1, Mei 2020, hal.13-28

digunakan adalah kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Bumdes dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi desa. Hasil penelitian terdahulu pengembangan ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Persoalan kesejahteraan masyarakat berawal dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah, strategi pembangunan desa dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimiliki dengan mengadakan berbagai program dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Persamaannya adalah sama-sama menjelaskan peran Bumdesa sebagai tempat penelitian sekaligus menjadi perantara memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbedaannya penelitian terdahulu melihat pada sumber daya manusia atau masyarakat dalam kaitan kinerja Bumdes, sedangkan penelitian ini melihat dari aspek – aspek yang berkaitan dengan unit usaha Bumdes.⁴⁸

⁴⁸ Zulfah Chikmawati, “Peran BUMDES dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumberdaya Manusia” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hal.101-113.